

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia, yang secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk untuk mengelola aset desa, sumber daya alam, dan potensi usaha lokal guna meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan komunitas desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kemandirian. Data Kemendes PDTT menunjukkan kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, terutama melalui sektor agribisnis, perdagangan, jasa, dan pariwisata desa. Secara khusus, BUMDes Jiyu Kutorejo yang berlokasi di Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, didirikan pada tahun 2018 melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebagai respons terhadap potensi ekonomi lokal yang melimpah, seperti pertanian padi, hortikultura, dan perdagangan hasil bumi. Unit usaha utamanya meliputi simpan pinjam (koperasi desa).

Namun, di balik keberhasilannya, BUMDes Jiyu Kutorejo menghadapi tantangan serius dalam hal akuntabilitas pengelolaan aset. Sistem informasi akuntansi yang masih

bergantung pada pencatatan manual menggunakan buku besar fisik menyebabkan seringkali kesalahan input data aset, seperti depresiasi yang tidak tepat atau inventarisasi yang terlambat. Selain itu, aksesibilitas laporan keuangan masih rendah, di mana laporan neraca dan laba rugi hanya dibagikan secara terbatas melalui pertemuan musdes, tanpa platform digital yang memungkinkan masyarakat desa mengaksesnya secara real-time. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan, konflik kepentingan antar pengelola, dan risiko penyalahgunaan aset, sebagaimana sering terjadi di BUMDes lain di Jawa Timur. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi modern dan peningkatan aksesibilitas laporan menjadi krusial untuk memastikan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung visi desa mandiri di Kutorejo, Mojokerto.

Data yang menjadi dasar penelitian ini bersumber dari berbagai lembaga resmi pemerintah dan survei independen, yang menggambarkan kondisi akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes secara nasional maupun regional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto tahun 2023, terdapat 189 desa administratif di kabupaten tersebut dengan 78 BUMDes aktif, di mana hanya 35% atau sekitar 27 unit yang telah menerapkan SIA berbasis digital seperti aplikasi Siskeudes atau software akuntansi khusus desa. Sisanya, 65% atau 51 BUMDes, masih mengandalkan pencatatan manual yang rentan terhadap human error, kehilangan dokumen, dan keterlambatan pelaporan bulanan. Data BPS juga menunjukkan bahwa kontribusi BUMDes terhadap PADes di Mojokerto mencapai 25% dari total PADes kabupaten, dengan nilai Rp 45 miliar pada 2023, namun tingkat akuntabilitas rata-rata hanya 64%

berdasarkan indikator transparansi dan audit internal. Pada tingkat provinsi, Laporan Kemendes PDTT tahun 2022 mencatat indeks akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes di Jawa Timur sebesar 68,4 dari skala 100, lebih tinggi dari rata-rata nasional 65,8, tetapi masih di bawah target RPJMN 2020-2024 yaitu 75. Faktor utama rendahnya indeks ini adalah minimnya SIA terintegrasi (hanya 40% BUMDes Jatim yang menggunakannya) dan aksesibilitas laporan yang terbatas (kurang dari 30% laporan tersedia online). Secara nasional, survei Akuntabilitas BUMDes oleh Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT tahun 2023 menemukan bahwa 45% BUMDes mengalami temuan audit terkait aset, seperti overvaluation atau aset fiktif, dengan kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun.

Laporan Pemerintah Desa Jiyu tahun 2023 juga mencatat bahwa hanya 20% masyarakat desa yang pernah mengakses laporan keuangan BUMDes, meskipun survei internal menunjukkan 85% warga menginginkan transparansi digital. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2023 memperkuat temuan ini, dengan BUMDes Jiyu Kutorejo berada di peringkat 15 dari 20 BUMDes unggulan terkait akuntabilitas. Data-data ini secara empiris menegaskan perlunya intervensi melalui SIA dan aksesibilitas laporan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset di BUMDes Jiyu Kutorejo.

Penelitian ini secara kuat didasarkan pada kerangka teori yang mapan dalam bidang akuntansi, manajemen publik, dan teknologi informasi, yang memberikan landasan konseptual untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap akuntabilitas. Pertama, Teori Akuntabilitas Publik teori ini mendefinisikan akuntabilitas sebagai proses pengelola BUMDes wajib memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya

kepada forum eksternal masyarakat dan pemerintah melalui mekanisme transparansi, debat, dan sanksi. Dalam konteks BUMDes, teori ini relevan karena pengelolaan aset desa bersifat publik, dan rendahnya transparansi laporan dapat menimbulkan distrust dari stakeholders.

Kedua, *Technology Acceptance Model* (TAM) memprediksi bahwa SIA yang user-friendly akan meningkatkan efisiensi pencatatan aset, mengurangi kesalahan, dan pada akhirnya mendukung akuntabilitas. Penelitian ini menerapkan TAM untuk mengukur adopsi SIA di BUMDes Jiyu Kutorejo, di mana tantangan literasi digital menjadi variabel moderasi.

Ketiga, *Teori Agency* menganalisis hubungan kontraktual antara principal (masyarakat desa sebagai pemilik aset) dan agent (pengelola BUMDes), di mana asimetri informasi dapat menyebabkan moral hazard dan adverse selection. Aksesibilitas laporan keuangan berfungsi sebagai *monitoring mechanism* untuk mengurangi agency cost, seperti penyalahgunaan aset. Teori ini diperkuat oleh konteks Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang mewajibkan transparansi sebagai bentuk pengawasan. Selain itu, efektivitas SIA tergantung pada faktor lingkungan organisasi BUMDes, seperti ukuran aset dan kompleksitas usaha. Integrasi ketiga teori ini membentuk model konseptual penelitian, di mana SIA dan aksesibilitas laporan secara langsung memengaruhi akuntabilitas melalui jalur transparansi dan pengawasan, dengan implikasi praktis bagi kebijakan desa di Mojokerto.

Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu penerapan SIA dan aksesibilitas laporan, memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap variabel dependen

akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes Jiyu Kutorejo, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. SIA didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk proses siklus akuntansi, termasuk input data aset, pemrosesan transaksi, dan output laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Di BUMDes Jiyu Kutorejo, SIA relevan karena aset fisik seperti lahan dan gudang memerlukan tracking real-time untuk menghindari kehilangan atau depresiasi yang tidak tercatat, sebagaimana dibuktikan oleh penurunan efisiensi aset sebesar 10% akibat pencatatan manual. Sementara itu, aksesibilitas laporan mengukur kemudahan akses stakeholders terhadap laporan keuangan neraca, rugi /laba, arus kas melalui media digital seperti website desa atau aplikasi mobile, yang selaras dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Relevansinya terletak pada peningkatan partisipasi masyarakat, di mana survei PMD Mojokerto 2023 menunjukkan 70% warga Kutorejo siap menggunakan platform digital jika tersedia. Kedua variabel ini secara kausal memengaruhi akuntabilitas, yang diukur melalui indikator transparansi (indeks disclosure), responsivitas (waktu pelaporan), dan evaluasi (tidak ada temuan audit). Relevansi lebih lanjut didukung oleh konteks lokal Mojokerto, di mana BUMDes berperan dalam program Ketahanan Pangan Jatim, sehingga akuntabilitas aset krusial untuk alokasi dana DD yang optimal. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan, dengan harapan hasilnya memberikan rekomendasi kebijakan seperti integrasi SIA dengan Sistem Informasi Desa (SID) nasional, sehingga variabel-variabel ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga aplikatif untuk penguatan ekonomi desa.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik serupa, memberikan dasar empiris dan mengidentifikasi celah yang diisi oleh studi ini. Penelitian Sari dan Pratama (2021) menguji pengaruh SIA terhadap akuntabilitas keuangan BUMDes di Jawa Tengah dengan sampel 50 BUMDes, di mana SIA berbasis web meningkatkan akurasi pelaporan aset hingga 40%. Studi ini menggunakan SEM-PLS dan menekankan peran TAM, mirip dengan pendekatan penelitian ini. Nugroho (2022) dengan metode kuantitatif survei pada 35 BUMDes Yogyakarta, dengan peningkatan indeks akuntabilitas 25% pasca-implementasi portal online. Penelitian ini relevan karena menyoroti agency problem di BUMDes kecil. Lebih dekat secara regional, Ramadan (2025) menganalisis efek simultan SIA dan aksesibilitas pada 42 BUMDes Jawa Timur, tetapi fokusnya pada aspek syariah dan belum spesifik pada Mojokerto. Penelitian lain seperti Widodo (2025) menemukan SIA mengurangi temuan audit BPK hingga 30% di BUMDes Jatim. Celah penelitian terdahulu adalah kurangnya studi kasus tunggal pada BUMDes Jiyu Kutorejo, yang memiliki karakteristik unik seperti dominasi aset agribisnis. Penelitian ini mengisi celah dengan pendekatan mixed-methods, menggabungkan regresi dan wawancara mendalam, serta memperluas variabel moderasi literasi digital untuk konteks Mojokerto.

Penelitian ini berpangkal pada hubungan kausal yang jelas tanpa SIA yang memadai, pencatatan aset BUMDes Jiyu Kutorejo rentan kesalahan (seperti terbukti 12% ketidaksesuaian audit BPK), dan aksesibilitas rendah menghambat pengawasan masyarakat, menyebabkan agency cost tinggi dan inefisiensi ekonomi desa. Logikanya, integrasi SIA dengan cloud computing dan aksesibilitas via SID dapat mengurangi waktu pelaporan dari bulanan menjadi harian, meningkatkan akuntabilitas secara

eksponensial sesuai model TAM dan agency theory. mendukung agenda nasional RPJMN 2020-2024 Pilar Ekonomi Desa, di mana BUMDes ditargetkan menyumbang 20% PDB desa, serta program Jatim Bangkit melalui penguatan UMKM desa. Secara praktis, hasil penelitian akan memberikan blueprint SIA gratis untuk BUMDes Mojokerto, berpotensi meningkatkan PADes 25% berdasarkan proyeksi BPS. Motivasi akademisnya adalah memperkaya literatur akuntansi desa dengan data primer dari Kutorejo, sementara motivasi sosial adalah pemberdayaan 5.000 warga Desa Jiyu melalui transparansi yang mendorong partisipasi dan kepercayaan publik. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi, penelitian ini termotivasi oleh urgensi adaptasi BUMDes terhadap era industri 4.0, Hariyono (2020) memastikan pengelolaan aset yang resilient dan inklusif bagi generasi mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan mengenai penjelasan latar belakang yang sudah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Apakah sistem informasi akuntansi manual berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan asset pada Desa Jiyu Kutorejo Mojokerto?
2. Apakah aksesibilitas laporan yang tidak dipublikasikan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan asset di Desa Jiyu Kutorejo Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi manual terhadap akuntabilitas pengelolaan asset desa jiyu ditengah minimnya pencatatan publik.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan tanpa publikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan asset desa jiyu.
- 3.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi segi teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan pemahaman teoritis tentang hubungan sistem informasi akuntansi (SIA) manual/Excel dan aksesibilitas laporan non-publik terhadap akuntabilitas pengelolaan asset.
2. Melengkapi literature akuntansi sector publik dengan bukti empiris dari konteks lokal (Jiyu, Kutorejo, Mojokerto), khususnya integritas teori stewardship agency dan public accountability.
3. Menyediakan model regresi empiris yang dapat direplikasi untuk studi serupa pada organisasi berbasis komunitas di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi implementasi SIA digital (misalnya, software berbasis web) untuk menggantikan pencatatan manual di Jiyu, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas asset.
2. Menawarkan panduan praktis bagi pengelola asset lembaga serupa untuk mempublikasikan laporan secara rutin (online/offline), mengurangi resiko ketidaktransparan.
3. Membantu praktis akuntansi ditingkat lokal meningkatkan kualitas pengelolaan asset melalui benchmark hasil penelitian.
4. Memudahkan masyarakat dalam mengakses laporan keuangan dan aset, sehingga warga memiliki dasar yang jelas untuk ikut serta mengawasi, memberikan masukan, serta memastikan pemanfaatan aset BUMDes tepat sasaran demi kepentingan bersama.